PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI)

ARTIKEL SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
UN PGRI Kediri

OLEH:

MARTHA AYU LUSIANA WAHYUDI
NPM : 12.1.02.01.0051

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA UN PGRI KEDIRI
2016

Skripsi oleh :

MARTHA AYU LUSIANA WAHYUDI
NPM : 12.1.02.01.0051

Judul :

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI)

Telah disetujui untuk diajukan Kepada

Panitia Ujian/Sidang Skripsi Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Tanggal:.....

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. M. Anas, SE., M.M., MSi	**Diah Nurdiwaty, SE., MSA**
NIDN. 0028106601	NIDN. 0728067201

Skripsi oleh:

MARTHA AYU LUSIANA WAHYUDI
NPM : 12.1.02.01.0051

Judul :

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI)

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri

Pada tanggal:_____

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dr. H. M. Anas, SE., M.M., MSi
2. Penguji I : Faisol, M.M
3. Penguji II : Diah Nurdiwaty, SE., MSA

Mengetahui,
Dekan FE

Dr. Subagyo, M.M
NIDN.0717066601

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI)

MARTHA AYU LUSIANA WAHYUDI
NPM : 12.1.02.01.0051
FE – Akuntansi
Email: martha.ayulusianawahyudi@gmail.com
Dr. H. M. Anas, SE., M.M., MSi [1] dan Diah Nur Diwaty, SE., MSA [2]
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unfaufully),* yang mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi tentang penggelapan pajak. 2) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak. 3) Untuk mengetahui alasan yang mendasari persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak. 4) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa yang sudah mendapat pelajaran mata kuliah perpajakan

Teknik penelitian ini adalah Deskriptif. Teknik penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, teknik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel tanpa membuat kesimpulan tentang populasi di mana sampel di ambil. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 221 orang mahasiswa akuntansi tingkat akhir kelas reguler. Sampel dalam penelitian sebanyak 30 responden teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Keadilan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sistem pajak secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Diskriminasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Nilai (*R square*) yang diperoleh sebesar 541. Hal ini berarti 54,1,2% dapat dijelaskan oleh variabel keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi sedangkan sisanya yaitu 45,9% penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Dengan tingginya tingkat pemahaman terhadap perpajakan diharapkan mahasiswa sebagai generasi penerus dapat melaksanakan fungsi dan tanggung-jawabnya dengan baik, serta melaksanakan dengan nilai moral yang baik pula. Sebaliknya pihak pemerintah harus lebih baik dalam mengelola dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak agar masyarakat lebih percaya bahwa uang pajak yang telah disetorkan telah digunakan dengan baik. Sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Kata Kunci: *keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan penggelapan pajak.*

I. LATAR BELAKANG

Globalisasi yang sedang terjadi telah menghilangkan batas ruang dan waktu setiap individu di dunia. Hal ini akan berdampak pada terwujudnya pasar bebas dalam berbagai sektor, termasuk perekonomian. Setiap negara harus dapat membuka diri dengan baik dalam persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya, termasuk Negara Indonesia. Pengamat ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Aviliani, SE., M.Si. dalam Destianto(2014) menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi suatu negara diartikan sebagai negara yang tidak bergantung pada negara lain, memiliki jati diri dan karakter yang kuat, serta memiliki ketahanan ekonomi dalam menghadapi berbagai macam krisis. Dalam proses mewujudkan kemandirian dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasisa Satra Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, dimana mahasiswa ini telah menerima mata kuliah perpajakan dan praktek pajak, selain itu nantinya mahasiswa ini merupakan generasi yang akan meneruskan memimpin bangsa. Dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan di teliti, peneliti melakukan replikasi dari peneliti terdahulu. Faktor-faktor dalam penelitian tersebut di uji kembali dalam studi ini guna mendapatkan keyakinan yang mendalam mengenai keterkaitan faktor keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penelitian ini di beri judul **"Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri)"**

II. METODE

Dalam penelitian ini teknik yang diambil adalah teknik penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2012;147) teknik penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, teknik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel tanpa membuat kesimpulan tentang populasi di mana sampel di ambil.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif kuantitatif. Disebut penelitian kualitatif kini jenis penelitian yang memerlukan pendapat orang lain atau responden dan kemudian di sebut penelitian kuatitatif karena terdapat pengukuran data melalui perhitungan statistik berasal dari subyek sampel(responden) yang diminta menjawab atas sejumlah pernyataan tentang masalah yang ada untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka, Sugiyono (2012;7).

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah semua mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun ajaran 2015/2016. Dengan jumlah 221 orang mahasiswa akuntansi tingkat akhir kelas reguler.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil subyek sampel sebanyak 30 mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi di UN PGRI Kediri yang menjadi anggota populasi.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kuisioner. Validitas menunjukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran (Azwar, 2000:5).

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuisioner adalah corrected item-total correlation, perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS 17 (Statistical Package for Social Science). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil

Tabel 4.1
Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	12	40%
Perempuan	18	60%
Total	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 4.2
Responden Menurut Usia

Usia Responden	Frekuensi	Prosentase
17-21	12	40%
22-26	11	36,7%
27-31	7	23,3%
Total	30	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Keadilan

No.	Item Pertanyaan	SKOR					Jumlah Skor
		1 (STS)	2 (TS)	3 (R)	4 (S)	5 (SS)	
1.	Penggelapan pajak disebut etis, jika resiko hukuman dan tertangkapnya sangat kecil	0 (0%)	3 (10%)	14 (46,7%	10 (33,3%	3 (10%)	30 (100%)
2.	Penggelapan pajak disebut etis, jika wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah harus membayar pajak dengan tinggi pula	0 (0%)	0 (0%)	14 (46,7%	9 (30%)	7 (23,3%)	30 (100%)
3.	Penggelapan pajak disebut etis, jika pemerintah menyamaratakan tarif pajak untuk seluruh wajib pajak tanpa melihat penghasilannya.	0 (0%)	2 (6,7%)	5 (16,7%	19 (63,3%	4 (13,3%)	30 (100%)
4.	Penggelapan pajak disebut etis, meskipun dana pajak digunakan dengan baik dan benar	0 (0%)	1 (3,3%)	11 (36,7%)	14 (46,7%	4 (13,3%)	30 (100%)
5.	Penggelapan pajak disebut etis, meskipun dana pajak digunakan untuk membangun fasilitas penting dan tidak memberikan keuntungan bagi dengan tingkat penghasilan	0 (0%)	0 (0%)	14 (46,7%	14 (46,7%	2 (6,7%)	30 (100%)

Sumber: Pengolahan data primer, 2016

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Sistem Perpajakan

No.	Item Pertanyaan	SKOR					Jumlah Skor
		1 (STS)	2 (TS)	3 (R)	4 (S)	5 (SS)	
1.	Penggelapan pajak disebut etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil	0 (0%)	9 (30%)	9 (30%)	8 (26,7%	4 (13,3%	30 (100%)
2.	Penggelapan pajak disebut etis, jika uang pajak yang terkumpul tidak di kelola dengan baik dan benar (korupsi)	0 (0%)	7 (23,3%	14 (46,7%	7 (23,3%	2 (6,7%)	30 (100%)
3.	Penggelapan pajak disebut etis, jika proses dan prosedur membayar pajak sulit	0 (0%)	8 (26,7%	10 (33,3%	8 (26,7%	4 (13,3%	30 (100%)
4.	Penggelapan pajak disebut etis, jika tarif pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan	0 (0%)	8 (26,7%	10 (33,3%	10 (33,3%	2 (6,7%)	30 (100%)
5.	Penggelapan pajak disebut etis, jika tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak tentang adanya sistem perpajakan yang baru untuk wajib pajak	0 (0%)	6 (20%)	8 (26,7%	10 (33,3%	6 (20%)	30 (100%)

Sumber: Pengolahan data primer, 2016

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Diskriminasi

No.	Item Pertanyaan	SKOR					Jumlah Skor
		1 (STS)	2 (TS)	3 (R)	4 (S)	5 (SS)	
1.	Penggelapan pajak disebut etis, jika petugas pajak tidak memiliki moralitas yang baik sehingga menimbulkan penggelapan pajak pada staff kantor pajak tersebut.	0 (0%)	4 (13,3%	13 (43,3%	11 (36,7%	2 (6,7%)	30 (100%)
2.	Penggelapan pajak disebut etis, jika pemerintah mendiskriminasikan saya karena agama, ras dan latar belakang etnis/budaya	0 (0%)	7 (23,3%	5 (16,7%	15 (50%)	3 (10%)	30 (100%)
3.	Penggelapan pajak disebut etis, jika zakat untuk wajib pajak beragama Islam digunakan sebagai faktor pengurang pajak	0 (0%)	8 (26,7%	5 (16,7%	12 (40%	5 (16,7%	30 (100%)
4.	Penggelapan pajak disebut etis, jika pemerintah hanya menindak lanjuti kasus penggelapan pajak yang menimpa usaha kecil menengah	0 (0%)	7 (23,3%	8 (26,7%	11 (36,7%	4 (13,3%	30 (100%)
5.	Penggelapan pajak disebut etis, jika pemerintah hanya mempidanakan (penjara) wajib pajak karena pendapat politiknya.	0 (0%)	6 (20%)	7 (23,3%	12 (40%	3 (10%)	30 (100%)

Sumber: Pengolahan data primer, 2016

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Penggelapan Pajak

No.	Item Pertanyaan	SKOR					Jumlah Skor
		1 (STS)	2 (TS)	3 (R)	4 (S)	5 (SS)	
1.	Penggelapan pajak dilakukan jika kemungkinan terdeteksi atas kecurangan dalam pengisian SPT itu rendah.	0 (0%)	7 23,3%	9 (30%)	11 36,7%	3 (10%)	30 (100 %)
2.	Penggelapan pajak dapat terjadi bila tarif pajak terlalu tinggi	0 (0%)	7 23,3%	7 23,3%	13 43,3%	3 (10%)	30 (100 %)
3.	Manajemen yang tidak transparan cenderung menutupi tindakan penggelapan pajak di dalam suatu organisasi.	0 (0%)	8 26,7%	11 36,7%	9 (30%)	2 (6,7%	30 (100 %)
4.	Tidak adanya sosialisasi perundang-undangan memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan praktik penggelapan pajak.	0 (0%)	8 26,7%	11 36,7%	8 26,7%	3 (10%)	30 (100 %)
5.	Penggelapan pajak dapat disebabkan karena gaya hidup konsumtif dan bermewah-mewahan.	0 (0%)	6 (20%)	9 (30%)	10 33,3%	5 16,7%	30 (100 %)

Sumber: Pengolahan data primer, 2016

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Keadilan	0,9	Reliabel
Sistem perpajakan	0,8	Reliabel
Diskriminasi	0,8	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,9	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

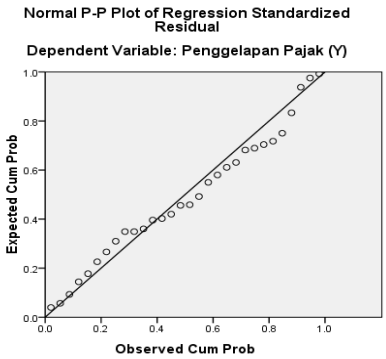

Gambar 4.1
Uji Normalitas Grafik *normal probability plot*
Sumber: Output SPSS

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Keadilan (X1)	.841	1.190
	Sistem Perpajakan (X2)	.803	1.245
	Diskriminasi (X3)	.689	1.450

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS 17.0

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.735[a]	.541	.488	2.14016	1.853

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi (X3), Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Sumber: output SPSS versi 17

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.735[a]	.541	.488	2.14016	1.853

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi (X3), Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Sumber: output SPSS versi 17

Tabel 4.13 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.795	3.864		9.263	.000
	Keadilan (X1)	-.469	.212	-.320	-2.205	.036
	Sistem Perpajakan (X2)	-.246	.114	-.321	-2.167	.040
	Diskriminasi (X3)	-.383	.176	-.348	-2.172	.039

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak (Y)

Sumber:Output SPSS 17.0

Pembahasan

1. **Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa, keadilan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Berarti hipotesis 1 H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan di pemerintah suatu negara, maka persepsi mahasiswa jurusan akuntansi akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

Keadilan memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan tersebut meskipun banyak perseptif yang mendasarinya. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi di mana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Menurut Siahaan (2010) menjelaskan tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain: 1) keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, 2) keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan dan 3) keadilan dalam penggunaan uang pajak.

Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Dengan tingkat keadilan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga akan timbul rasa percaya dan aman ketika masyarakat membayarkan uang pajak. Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa jurusan akuntansi akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi (2015), Irma (2013) di mana dalam hasil penelitiannya berhasil membuktikan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi

tingkat keadilan di pemerintah suatu negara, maka masyarakat akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis.

2. **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa, sistem perpajakan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Berarti hipotesis 2 H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka semakin rendah persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak yang dianggap etis.

Sistem perpajakan merupakan keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri. Jogiyanto (2005) menjelaskan bahwa sistem perpajakan merupakan hubungan jaringan kerja yang saling berinteraksi atas prosedurnya untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Kecurangan yang terjadi di dalam sistem ini menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah.

Penjelasan dari hasil penelitian tersebut dijelaskan dengan jawaban responden pada mahasiswa jurusan akuntansi. Sistem perpajakan yang baik akan dirasakan oleh mahasiswa jurusan akuntansi karena dalam penelitian ini mahasiswa yang dipilih sebagai responden telah mendapatkan pengetahuan pajak melalui mata kuliah perpajakan. Dengan begitu, mahasiswa disini mengetahui sistem perpajakan yang seharusnya berlaku di Indonesia. Sistem perpajakan yang baik akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terlebih lagi jika didukung oleh sumber daya manusia atau aparat pajak yang baik pula. Kondisi ini akan memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap

mahasiswa jurusan akuntansi sebagai subjek pajak.

Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka akan semakin merasa mudah dan dilayani dengan baik oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin meningkat. Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa jurusan akuntansi akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reskino (2013), Devi (2015) dan Irma (2013) di mana dalam hasil penelitiannya berhasil membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka persepsi masyarakat menganggap penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis.

3. Pengaruh Diskriminasi terhadap Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

Pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa, diskriminasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Berarti hipotesis 3 H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin banyak bentuk diskriminasi dalam suatu negara, maka mahasiswa jurusan akuntansi memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan.

Pemerintah dikatakan melakukan diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan disisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku. Sehingga, masyarakat khususnya mahasiswa jurusan akuntansi akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.

Menurut Danandjaja (dalam Rahman, 2013) menjelaskan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan rasa, ke sukubangsaan,

agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reskino (2013), Devi (2015) dan Irma (2013) di mana dalam hasil penelitiannya berhasil membuktikan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak bentuk diskriminasi dalam suatu negara, maka masyarakat memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak etis dilakukan.

4. **Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak**

Dari hasil perhitungan uji F pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak , sehingga hipotesis H_a dalam penelitian ini diterima.

Hal ini berarti, keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh positif secara parsial terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi (2015) bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan keadilan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irma (2013) bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh negatif

signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reskino (2013) bahwa terdapat pengaruh signifikan diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

4. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (*R square*) dapat dijelaskan bahwa, pengaruh variabel keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi sebesar 54,1%. Sedangkan sisanya yaitu 45,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu Devi (2015), Irma (2013) dan Reskino (2013) bahwa keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa jurusan akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Intan Yuningtyas, Naili Farida, Saryadi. 2013. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu*. Diponegoro Journal Of Social And Politic.

Anzwar, 2000. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Ariyanti, F. 2013. *Pengusaha UKM Masih Ingkar Janji Bayar Pajak*. (http://bisnis.liputan6.com/read/778782/pengusaha-ukm-masih-ingkar-masih-ingkar-janji-bayar-pajak) , diunduh 7 November 2015

Destianto, L. 2014. *Aviliani: Jati Diri Bangsa Terletak pada Kemandirian Ekonomi*. (http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/1358-avilliani-jati-diri-bangsa-terletak-pada-kemandirian-ekonomi.html), diunduh 10 November 2015

Danandjaja, James. 2003. *Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera.*

Devi, Nur Cahaya Ningsih. 2015. *Determinasi Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)*, 1. (Online), tersedia: http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1625 , diunduh 7 November 2015.

Duadji, S. 2008. *Selayang Pandang: Praktik Pencucian Uang dan Kejahatan asal*. Bandung: Books Terrace & Library.

Fitra. 2012. Tax Ratio 2013 Bisa 14 %. http://www.investor.co.id/home/fitra

-tax-ratio-2013-Bisa-14/44235) , di akses 6 April 2016

Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Ika, *"Kepala KPP Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak"*, Diakses melalui: http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4561, di akses 15 November 2015.

Indah, Sri S, Susilowati, Budiarti. 2005. *Analisis Pengaruh Kinerja Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Negara*. JEBA, vol 7, 1 : 57-65.

Jogiyanto, H. M. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi.* Yogyakarta: Andi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2015. (*http://kbbi.web.id/pajak*) , di akses 10 November 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2015. (*http://kbbi.web.id/adil*) , di akses 10 November 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2015. (*http://kbbi.web.id/sistem*) , di akses 10 November 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2015. (*http://kbbi.web.id/diskriminasi*) , di akses 10 November 2015.

Kirchler. Erich, Boris maciejovsky & Friedrich schneider, *"Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences mater?"*, SSRN, 2001

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Jakarta: Penerbit ANDI.

Marisa dan Agus. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax and Accounting Review, vol 1,1 : 124 - 135

Nickerson, I., Pleshko, L.,McGee, R. W. 2009. *Presenting The Dimensionality Of An Ethics Scale Pertaining To Tax Evasion*. *Journalof Legal, Ethical and Regulatory Issues.* Volume 12, Nomor 1; 1-14.

Peraturan Perpajakan. 2015. (www.pajak.co.id) , di akses 12 April 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. (http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=207) , di akses 12 April 2016